

Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Kota Batam

¹Ayu Wulandari

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb191010038@upbatam.ac.id

correspondance: pb191010038@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

KEYWORDS

Policy, homeless people, beggars

KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: pb191010038@upbatam.ac.id

Abstracts

Homeless people and beggars on the streets are troubling the people of Batam City. In addition, it also violates the public order of Batam City because Batam is a homeless and beggar-free area. Homeless and beggars are often found at red lights and the control of homeless people has been carried out by the Batam city government. The control was carried out through the Batam City Social and Community Empowerment Service or known as UPTD Nilam Suri, but there were still homeless people roaming around. The purpose of this study is to analyze the evaluation of social service policies in dealing with homeless people and beggars as well as the factors that become obstacles to policy evaluation. This research needs to be carried out so that the Batam City government provides a new breakthrough to overcome the problem of homeless people and beggars who still roam the streets and provide a deterrent effect. This aims to make Batam City free of homeless people and beggars. The type of research used is descriptive qualitative, to provide an understanding of the problem under study. The results of the study show that the Policy Evaluation of the Social Service in dealing with homeless and beggars in Batam City has been going well but not optimal. This is due to budget constraints so that the number of human resources or HR qualifications, and supervision is inadequate.

Abstrak

Gelandangan dan pengemis di jalanan meresahkan masyarakat Kota Batam. Selain itu, juga melanggar ketertiban umum Kota Batam karena Batam merupakan daerah bebas gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis banyak dijumpai di lampu merah dan penertiban gelandangan sudah dilakukan oleh pemerintah kota Batam. Penertiban dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Kota Batam atau dikenal dengan UPTD Nilam Suri, namun masih ada gelandangan yang berkeliaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi kebijakan dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis serta faktor-faktor yang menjadi penghambat evaluasi kebijakan. Penelitian ini perlu dilakukan agar pemerintah Kota Batam memberikan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan serta memberikan efek jera. Hal ini bertujuan agar Kota Batam bebas dari gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Hasil kajian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Batam sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran sehingga jumlah SDM atau kualifikasi SDM, dan pengawasan kurang memadai.

Pendahuluan

Sebagai salah satu Negara berpenghasilan menengah Indonesia tetap dianggap sebagai negara berkembang. Setiap bangsa didorong untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan tingkat kecanggihannya. Di dalam Proses pembangunan memiliki aspek positif dan negatif, sehingga sulit untuk membedakannya dari proses pembangunan. Negara berkembang menghadapi berbagai masalah pembangunan. Untuk itu dibutuhkan pengembangan dalam peningkatan nilai-nilai positif sehingga dampak negatif menurun perlahan, kemiskinan merupakan masalah paling tinggi dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini.

kemiskinan merupakan keadaan dimana individu mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan rumah tangga, sosial dan ekonomi yang berdampak pada lingkungan, interaksi sosial dikarena minimnya penghasilan (Bahagia, 2020). Kemiskinan terdiri dari tiga jenis yaitu 1) kemiskinan absolut yaitu seseorang individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, serta pemenuhan pendidikan dan kesehatan. 2) kemiskinan relatif, apabila seseorang individu mampu menyediakan kebutuhan hidup tetapi masih dikatakan miskin karena ketebatasan kemampuan seperti skill dan pengalaman. 3) kemiskinan kultural merupakan kemiskinan karena tidak adanya usaha dari individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan rasa malas dan tingkat kepedulian yang kurang (Zamharira & Arantika, 2018). Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu faktor individu menjadi gelandangan dan pengemis.

Salah satu kota dengan jumlah pengemis dan gelandangan yang tinggi adalah Kota

Batam. Kota Batam sendiri merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi tinggi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia karena Kota Batam berbatasan dengan negara luar yaitu negara Singapura dan Malaysia yang menunjang para pembisnis untuk berinvestasi di bidang industri dan pariwisata.

Selain itu, kondisi ekonomi Kota Batam yang terus meningkat membutuhkan kesiapan mental dan persaingan yang ketat terutama dalam bidang pendidikan, skill, pengalaman yang berpengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik apabila kurangnya pendidikan, skill dan kesiapan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Keadaan tersebut cukup berdampak buruk pada kenyamanan masyarakat, para wisata dan lingkungan sekitar.

Dalam hal ini sangat disayangkan jika Pemerintah Kota Batam tidak melakukan tindakan terkait munculnya para gelandangan dan pengemis. Permasalahan ini tentunya tidak sesuai dengan Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kota Batam yang merupakan kota bebas dari gelandangan dan pengemis yang telah ditetapkan dalam PERDA Kota Batam No. 06 Ta. 2002 yaitu Ketertiban Sosial di Kota Batam dilanggar dengan adanya gelandangan dan pengemis selain merusak pemandangan dan meresahkan masyarakat (Jalizar, 2019). Dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut Pemerintah Kota Batam berupaya mengarahkan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di beberapa ruas-ruas jalan yang ada di Kota Batam terus diadakan melalui razia secara rutin. Dalam hal ini Dinas Sosial juga berperan dalam penanganan para pengemis

dan gelandangan. Kemudian tindakan selanjutnya dilakukan pemerintah Kota Batam melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak berpengaruh terhadap perubahan sikap dari gelandangan dan pengemis di Kota Batam yang terus kembali dijalan untuk mengemis (Batampos.co.id).

Adapun jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun tersebut seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Rata-rata jumlah peningkatan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam tahun 2017-2018

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2017	1.200	700
2	2018	333	-
3	2019	588	300

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dari tahun 2017 sangatlah tinggi. Kemudian pada tahun 2018 jumlah gelandangan menjadi berkurang dan meningkat lagi pada tahun 2019 dengan jumlah 588 jiwa sedangkan pengemisnya 300 jiwa. Sedangkan jumlah pengemis pada tahun 2017 juga sangat tinggi dengan jumlah 1.200 jiwa dan pengemis 700 jiwa.

Kemudian tahun 2018 bebas pengemis, tetapi jumlah gelandangan ada 333 jiwa yang sedikit terjadi penurunan, hal tersebut tidak bertahan lama dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun 2018 dengan total peningkatan 255 jiwa. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang dalam penanganan peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengkaji lagi permasalahan yang ada dengan berfokus pada Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam.

Kajian Teori

Kebijakan publik adalah Instansi pemerintah yang membuat sejumlah keputusan yang saling terkait di setiap bidang terkait dengan tugasnya, termasuk pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kejahatan, kota, dan lainnya (Wahab, 2021). Kebijakan biasanya digunakan untuk memilih dan menyoroti keputusan paling penting untuk meningkatkan fungsi organisasi pemerintah dan swasta. Satu-satunya tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah di masa depan.

Untuk membedakan perilaku politik yang tidak pantas dari perilaku institusional atau kepentingan pribadi, istilah "kebijakan" sering digunakan secara berlebihan (Putra, 2017). Kebijakan publik memiliki definisi yang serupa, yang masing-masing menunjukkan penggunaan tingkat perbandingan nilai untuk membandingkan hasil kebijakan dan perencanaan program yang telah di tentukan (Hayat, 2018).

Dari permasalahan tersebut, sangat di perlukan tindakan pemerintah dengan cara mengevaluasi ulang dalam peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan. Dari penjelasan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang ada yang berjudul ``Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penganganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam.

Kebijakan adalah kumpulan perbuatan, sikap, tujuan, dan pilihan yang dibuat oleh pelaku (pihak yang berafiliasi) dalam upaya untuk memecahkan masalah. Perlu di pahami bahwa dari berbagai kebijakan yang telah di rencanakan memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan, kemudian disempurnakan kembali oleh mereka yang mendorong kebijakan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam menentukan apakah suatu program atau kebijakan yang telah

ditetapkan dapat mencapai tujuannya. sehingga pemerintah dapat menilai dampaknya terhadap masyarakat dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan (Agustino, 2012). Penilaian dari tingkat keberhasilan dari kebijakan yang telah direncanakan dan kemudian di implementasikan di sebut evaluasi kebijakan. Pentingnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengurangi kemungkinan adanya masalah-masalah baru, disebabkan adanya perwujudan dari pkepentingan pribadi yang dilakukan oleh pihak berkepentingan dan pihak penguasayeng menyebabkan kebijakan yang telah telaksana tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga ketetapan dan kuatnya kebijakan tidak bertahan lama (Hardini, 2013).

Adapun tahap evaluasi kebijakan yang harus diambil saat melakukan evaluasi kebijakan. Metode evaluasi menggunakan tipe sistematis yang disebut evaluasi ilmiah sebagai evaluasi yang baik. Menurut pall dikutip oleh (Hayat, 2018) dalam hal ini evaluasi kebijakan di bedakan menjadi empat bagian, yaitu: perencanaan dan kebutuhan, proses, dampak, dan efisiensi. Ada berbagai langkah yang harus diambil saat melakukan evaluasi kebijakan. Metode evaluasi menggunakan tipe sistematis yang disebut evaluasi ilmiah sebagai evaluasi yang baik. Indikator Evaluasi menurut (Maulina, 2020) terdiri dari:

1) Indikator input

Yang menjadi fokus penilaian pertama, dilihat dari penyediaan sumber daya dan penyediaan kebutuhan dasar, sebagai pendukung dari pelaksanaan kebijakan.

2) Indikator proses

Bentuk penilaian yang dilakukan dengan melihat cara menyampaikan dan mengsosialisasikan kebijakan seperti pemberian pelayanan secara langsung, memaksimalkan kepada masyarakat sehingga adanya kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

3) Indikator Output

Penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat dinilai dari tingkat partisipasi dari masyarakat yang ikut bergabung dalam mewujudkan keberhasilan program yang telah direncanakan.

4) Indikator Dampak

Penilaian yang membebankan pada apa saja yang terjadi setelah kebijakan tersebut di implementasikan dan apakah kebijakan tersebut membawa perubahan.

Menurut (Anderso, 2018) Faktor yang mempengaruhi Evaluasi ada beberapa bagian:

1) Sumber daya tidak memadai

Penyediaan sumber daya yang kuran akan berpengaruh terhadap evaluasi keibijakan.

2) Cara implementasi yang tidak tepat yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan tidak sesuai keadaan dan kebutuhan saat itu sehingga akan berdampak pada kerugian terutama pada materi, pengadaan barang dan keuangan.

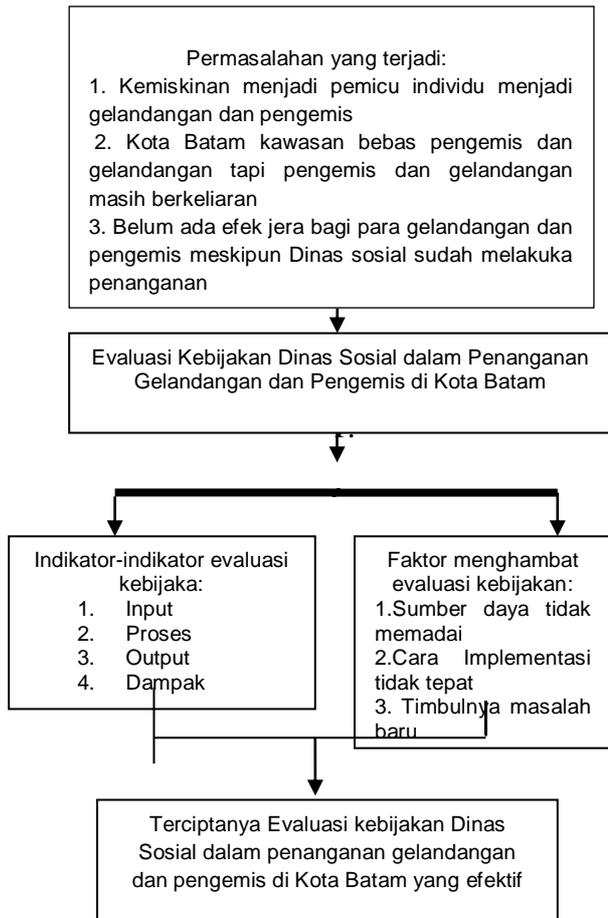
3) Timbulnya permasalahan baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindak.

Penelitian yang dilakukan oleh Vania (2021) dengan judul Evaluasi program desaku Menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan program Desaku Menanti dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Padang belum optimal. Hal ini dikarenakan belum tercapainya tujuan program Desaku Menanti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yakobus, 2017) dengan judul evaluasi implementasi program penanganan anak jalanan, dan pengemis berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013. Penelitian kualitatif dengan kesimpulan bahwa tinjauan pelaksanaan program terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berjalan lancar. Elemen pendukung meliputi linearitas, efisiensi yang membuahkan hasil positif, dan produktivitas yang diharapkan. Unsur penghambat meliputi linearitas

pendanaan yang kurang, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan keterlambatan. Tujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya belum terpenuhi. Tingkat produktivitas yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang belum tercapai. Kerangka Pemikiran Dalam Tulisan ini ialah dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Data Peneliti 2023)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) yaitu menyatakan bahwa peneliti adalah yang paling utama dalam penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai

alat utamanya. Alih-alih menggeneralisasi, kita harus fokus pada makna. Tujuan peneliti adalah melakukan penelitian kualitatif yang menelaah pertanyaan-pertanyaan yang masih samar-samar dengan maksud untuk menggali lebih dalam tentang keadaan yang terjadi di lapangan sehingga data dan fakta dapat diperoleh.

Sumber Data, Untuk penelitian ini sumber data yang di peroleh berdasarkan pada (Sugiyono, 2017) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dari pihak yang telah ditentukan terlebih dahulu yang berkaitan tentang permasalahanyang diteliti. Sedangkan yang menjadi sumber data primer di peroleh dari wawancara kepala UPT panti rehabilitasi sosial Nilam Suri, Kasubag TU, penanggungjawab panti rehabilitasi sosial Nilam Suri, bidang pekerja sosial, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi dan masyarakat. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung didapat dari sumbernya. Data sekunder di peroleh peneliti melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, media cetak, website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Metode Analisis Data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data . Reduksi data Peneliti mengumpulkan ringkasan dari data-data, inti masalah dan kebenaran informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Mendatangi secara langsung Dinas Sosial bagian dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mudah memperoleh data. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk melihat tingkat pemahaman dari peneliti dalam dalam memahami data yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan Masalah baru yang tidak pernah ada sebelumnya dan dibuktikan kebenaran, relevansi dengan menskripsikan objek permasalahan yang pada awalnya tidak adanya kepastian penyebab timbulnya permasalahan, kemudian di temukan

kebenaran yang menimbulkan adanya interaksi-intraksi, hipotesis, dan memungkinkannya terbentuknya teori baru setelah dilakukan penelitian Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data yaitu Observasi.

Observasi adalah proses mengamati objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan mencatat hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti pada penelitian memperhatikan fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi objek penelitian yaitu mengamati tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat Kota Batam melalui UPT Nilam Suri serta memperhatikan respon dari masyarakat, gelandangan dan pengemis di jalan dari kegiatan Dinas Sosial.

Wawancara merupakan proses mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Dinas Sosial Kota Batam dalam melakukan pembinaan dan masyarakat dengan tanggapannya dari pembinaan gelandangan. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data untuk memperkuat pernyataan dari objek dan subjek penelitian secara tidak langsung, dokumentasi berupa foto dan bukti lainnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi kelembagaan perangkat daerah yang berperan strategis dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) dan pemenuhan pemberdayaan masyarakat. (OPD) adalah satu. Kegiatan Departemen Sosial dan Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan

secara terpadu dengan tujuan mengurangi masalah-masalah sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu, dan meningkatkan PMKS. Peran dari Dinas Sosial serta dukungan dari masyarakat memainkan peran kunci dalam meningkatkan dukungan sosial, terutama untuk mengurangi banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis dengan memperkuat komunitas dan sosialisasi dari masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pemenuhan kebutuhan masing-masing keluarga. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial diartikan sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial suatu masyarakat agar dapat hidup yang selayaknya, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya. meningkatkan.

Keberadaan sekretariat yang membidangi masalah sosial dan pengembangan masyarakat bukan berarti tidak ada masalah, sebaliknya semakin maju suatu daerah atau kota, maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya masalah sosial. Pada tahun 2016, sekitar 26 orang penyandang masalah bantuan sosial (PMKS) miskin, menurut fakta yang dihimpun dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Kota Batam. 53.850 RTS/jiwa (41.768 RTS dan 12.082 orang), fakta ini digunakan sebagai dasar penawaran dan wajah. Persoalan ini membutuhkan peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kota Batam.

Dinas berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini melalui rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, penyalahgunaan dan pemberdayaan. Para gelandangan dan pengemis tersebut diberikan pemahaman oleh Dinas sosial dengan melakukan pendekatan secara humanis, Meskipun sempat ada penolakan namun setelah dilakukan pendekatan para gelandangan tersebut merasa nyaman. Setelah nyaman maka para gelandangan dan pengemis tersebut diberikan

pembinaan melalui UPT Nilam Suri tempat pembinaan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Sosial (PMKS).

Suatu kebijakan dapat dinyatakan efektif apabila kebijakan berjalan baik dan mencapai hasil tujuan yang ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator Menurut (Maulina, 2020) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

1 Indikator input yaitu fokus pada penilaian kesesuaian pada penyediaan sumber daya pendukung seperti bahan-bahan dasar yang dibutuhkan Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Indikator ini dapat meliputi penyediaan sumber daya manusia, pemberian materi, pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di Dinas Sosial. Dinas Sosial dalam pemberdayaan Masyarakat mempunyai unit khusus terutama dalam pelaksanaan teknis dibidang pusat pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nilam Suri (P2MKS). UPT Nilam Suri adalah tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun UPT Nilam Suri tersebut masih di perlukan peningkatan penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial, kekurangan lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi adalah pendanaan yang tidak memadai.

2 Indikator proses . Bentuk penilaian yang dilakukan dengan melihat cara menyampaikan dan mengsosialisasikan kebijakan seperti pemberian pelayanan secara langsung, memaksimalkan kepada masyarakat sehingga adanya kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Bagian ini merupakan cara melihat efektivitas dan efesienalnya kebijakan yang ditetapkan seperti meningkatkan pelayanan.

Proses yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan

gelandangan dan pengemis melalui UPT Nilam Suri tempat pembinaan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Sosial (PMKS). PMKS milik UPT Nilam Suri merupakan hasil sosialisasi dari dinas sosial, masyarakat dan anak-anak yang dilindungi undang-undang. UPT Nilam Suri disponsori langsung oleh Dinas Sosial dan berbagi anggaran yang sama dengan Dinas Dukungan Sosial dan Masyarakat Kota Batam. Adapun proses yang dilakukan berupa sosialisasi melalui radio Batam FM, media sosial, dialog asosiasi, bakti sosial, iklan dan kontak langsung dengan masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap sosialisasi yang berlangsung sebenarnya sangat baik. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Kota Batam mengetahui adanya pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun sosialisasi ini terkendala anggaran yang masih minim.

3 Indikator Output

Fokus penilai terhadap hasil dari kegiatan program yang dilakukan oleh UPT Nilam Suri dalam mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis melalui pembinaan dan seberapa banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dari kebijakan Dinas Sosial tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

4 Indikator Dampak

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pelaksanaan program merupakan bagian dari dampak baik positif maupun negatif seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung mendukung kebijakan pemerintah, dampak lain yaitu memungkinkan berkurangnya jumlah gelandangan di Kota Batam setelah adanya pelaksanaan program pembinaan.

Faktor yang menghambat evaluasi kebijakan Menurut Anderson (Anggara,2018.) Adapun faktor yang menghambat evaluasi kebijakan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Yang Tidak Memadai

Sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menghambat evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Saat ini sumber daya masih kurang. Selain itu, anggaran yang disediakan untuk kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui pembinaan UPT Nilam Suri masih sangat minim dan menjadi keterbatasan bagi UPT Nilam Suri untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, UPT Nilam Suri dengan Sumber daya dan anggaran seadanya kegiatan pembinaan dilakukan terbatas. Meskipun begitu UPT Nilam Suri tetap berupaya menciptakan Kota Batam sebagai kota kawasan bebas gelandangan dan pengemis meskipun sumber daya dan anggaran menjadi penghambat evaluasi kebijakan Dinas Sosial tersebut.

2) Cara Implementasi Yang Tidak Tepat

Jika pengimplementasian suatu kebijakan tidak tepat maka berdampak tidak baik pada hasil kebijakan. Sejauh ini implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan baik. Sosialisasi dilakukan bertujuan agar para gelandangan dan pengemis yang dibina di UPT Nilam Sari tidak hanya dalam pengawasan Dinas sosial namun masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke dinas terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran.

3) Timbulnya Masalah Baru

Pengimplementasian suatu kebijakan tentunya diharapkan adanya perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sejauh ini UPT Nilam Suri sudah melakukan pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis. Para gelandangan dan pengemis di berikan pembinaan melalui pendekatan yang membuat para gelandangan dan pengemis merasa nyaman sehingga bisa dibina di UPT Nilam Suri. Namun, sejauh ini para gelandangan dan pengemis yang setelah dibina tersebut menimbulkan kekawatiran bagi dinas sosial. Hal ini dikarenakan minimnya

SDM dan anggaran sehingga Dinas Sosial tidak bisa memantau para gelandangan dan pengemis setelah dibina sudah pulang ke kampung halaman atau kembali berkeliaran di jalanan. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi dinas sosial

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan bahwa Evaluasi Kebijakan Dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui Pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Sosial (P2MKS) yang dikenal dengan UPT Nilam Suri sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dilihat dari evaluasi kebijakan menurut (Maulina, 2020) yaitu :

Indikator input, indikator proses, indikator output indikator dampak. sejauh ini tidak efektif karena kurangnya anggaran, jumlah ESDM atau kualifikasi ESDM, dan pengawasan program. Pelaksanaan kebijakan terbatas karena sumber daya dan anggaran yang masih minim. Adapun faktor penghambat evaluasi kebijakan Sumber daya yang tidak memadai. implementasi yang masih belum maksimal. Sejauh ini implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan baik.

Sosialisasi dilakukan bertujuan agar para gelandangan dan pengemis yang dibina di UPT Nilam Suri tidak hanya dalam pengawasan Dinas sosial namun masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke dinas terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran. Timbulnya masalah baru sejauh ini para gelandangan dan pengemis yang setelah dibina tersebut menimbulkan kekawatiran bagi dinas sosial. Hal ini dikarenakan minimnya SDM dan anggaran sehingga Dinas Sosial tidak bisa memantau para gelandangan dan pengemis setelah dibina sudah pulang ke kampung halaman atau kembali

berkeliranan dijalankan. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi dinas sosial

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (N.D.). *Kebijakan Publik*.

Bahagia. (2020). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*.

Hardini, H. K. (2013). . Public Service Quality And Building Coordinate Policy: An Analytical Study Of Jamkesmas And Jamkesda Implementation. *Journal Of Government And Politics Vol 4 No 2 August 2013. Hal 278*.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Dan Formulasi*.

Jalizar, A. (2019). Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Pada Tahun 2017-2019. *Lmupemerintahan, Issn 2746-*.

Maulina, P. (2020). *Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Putra, Y. H. (2017). Perencanaan Tahapan Prioritas Strategi Berdasarkan Kebijakan Yang Ada Di Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Untuk Merealisasikan E-Government. *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 3(1).

Samhana Risyah, A. (2022). *Pengaruh Pengembangan Karir, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterikatan Karyawan Pada Pt. Bridon Bekaert*. Unsada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, C).

Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model*

Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.

Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal Of Government And Social Science*, 4(1), 115–127.